



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Soekarno Hatta No 153 Kebumen Telp.(0287) 381518, Fax (0287) 381989

Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id Website :
www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Kode Pos : 54311

Kebumen, 7 Desember 2022

Nomor : 005/359
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada

- Yth. 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
4. Terlampir
di -
TEMPAT

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Desember 2022

Waktu : Pukul 09:00 s.d selesai

Tempat : Aula Dinsos P3A (Lantai 2)

Acara : Rakor POP Internal TW IV Dinsos P3A Kab. Kebumen

Keterangan : Undangan No 1-4 di mohon hadir sebagai Narasumber dan membawa surat tugas

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN KEBUMEN



Drs. EKO WIDIANTO

Pembina Utama Muda

NIP.196304131986071001

TUJUAN SURAT

No.	Tujuan
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen
4.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kebumen
5.	Pejabat Struktural Dinsos P3A Kab. Kebumen
6.	Pejabat Fungsional Dinsos P3A Kab. Kebumen
7.	Bendahara Pengeluaran Dinsos P3A Kab. Kebumen



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Soekarno Hatta No 153 Kebumen Telp.(0287) 381518, Fax (0287) 381989

Email : dinsosp3a@kebumenkab.go.id Website :
www.dinsosp3a.kebumenkab.go.id
Kode Pos : 54311

Kebumen, 8 Desember 2022

Nomor : 005/361
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan Rakor Pop TW IV

Kepada
Yth. Inspektur Daerah Kabupaten
Kebumen
di -
TEMPAT

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 08 Desember 2022

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Dinas Sosial P3A Lantai II

Acara : : Rakor POP Internal TW IV Dinsos P3A Kab. Kebumen

Keterangan : Di mohon hadir sebagai Narasumber dan membawa
surat tugas

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kehadirannya diucapkan terimakasih

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN KEBUMEN



Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP.196304131986071001

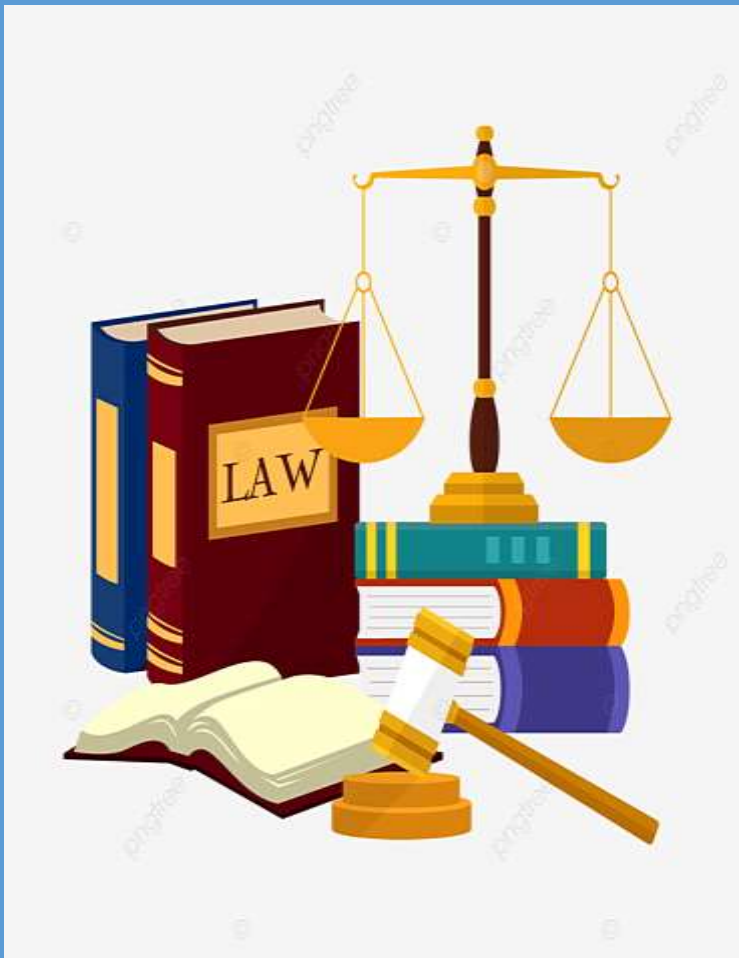
RAKOR POP TW IV



Kebumen, 8 Desember 2022

DINAS SOSIAL P3A KAB. KEBUMEN

DASAR HUKUM



Perbup No 16/2021 tentang kedudukan, SOTK Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Surat Edaran No 975/2341 tentang Rakor POP/K Perangkat Daerah TA 2022 Triwulan III



Perbup No 103/2020 tentang pedoman dan pelaksanaan pengendalian APBD beserta perubahannya **Perbup 13/2021**, dlm rangka pengendalian pembangunan/keg secara umum serta untuk membantu penyelenggaraa pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku, agar melaksanakan Rakor POP/K PD setiap triwulan

Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial P3A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Sosial Dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah



Penyusunan rencana dan program di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak



Perumusan kebijakan dibidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

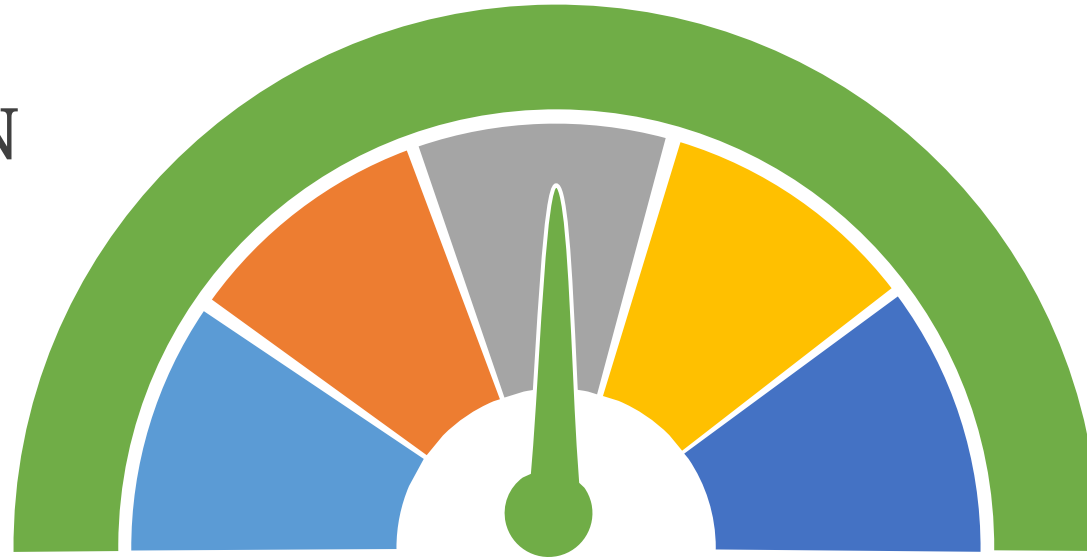


Pelaksanaan koordinasi di Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Rencana Kerja

2 URUSAN

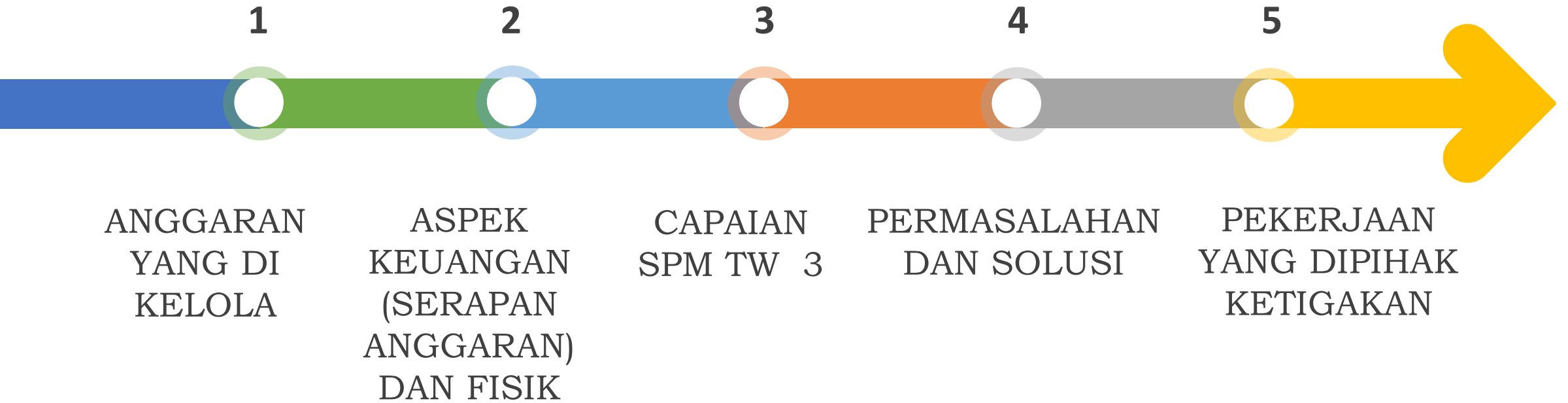
13 PROGRAM



26 KEGIATAN

59 SUB
KEGIATAN

Evaluasi terhadap



ANGGARAN YANG DIKELOLA

Total Operasi : Rp. 10.978.117.200

Belanja Pegawai : Rp. 3.842.867.000

Belanja Barjas : Rp. 4.722.179.200

Belanja Hibah : Rp. 20.000.000

Belanja Bansos : Rp. 2.393.071.000

**TOTAL MODAL
Rp. 16.961.000**

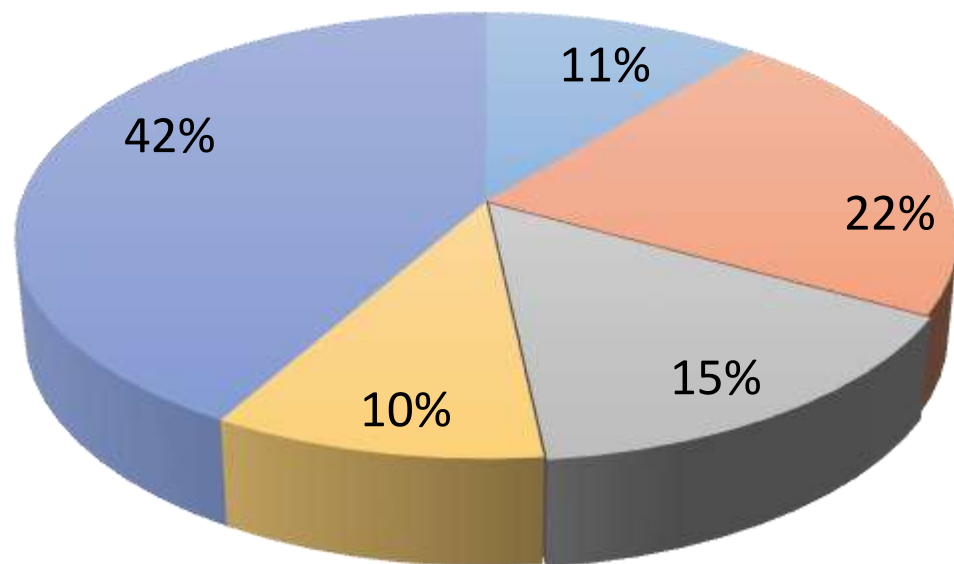
**Belanja Modal
Rp. 16.961.800**

**TOTAL BELANJA
Rp 10.995.079.000**

1

ALOKASI ANGGARAN PERBIDANG

- Bid. Perlindungan dan Jaminan sosial
- Bid. Penanganan Kemiskinan dan Pemberdayaan sosial
- Bid. Rehabilitasi Sosial
- Bid. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Sekretariat



1

Bidang 1

Bidang perlindungan dan jaminan sosial (1.202.710.000)

2

Bidang 2

Bidang Penanganan kemiskinan dan pemerdayaan social (2.431.122.000)

3

Bidang 3

Bidang Rehabilitasi Sosial (1.679.477.000)

4

Bidang 4

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (1.087.082.000)

5

Sekretariat

Sekretariat (4.594.688.000)

Pagu anggaran Rp 10.995.079.000

Uraian	Target		Realisasi		Deviasi
	Rp	%	Rp	%	%
KEU	10.995.079.000	100	9.253.344.147	84,16	15,84
FISIK	10.995.079.000	100	9.577.120.777	87,10	12,90

Progres penatausahaan keuangan

1. SPP/SPM/SP2D

NO	SPP/SPM/SP2D	RENCANA	REALISASI	Rp.
1	Uang Persediaan (UP)	1 Kali	1 Kali	275.048.000
2	Ganti Uang Persediaan (GU)	12 kali	15 kali dengan NIHIL	3.131.195.947
3	LS (Gaji, belanja barang jasa, hibah dan bansos)	60 kali	55 kali	6.122.148.200
	Jumlah (Rp)			9.528.392.147
	Prosentase (%)			86,67%

2. Uang Persediaan Rp. 275.048.000,-

- Saldo KAS per 6 Desember Rp 275.048.000,- terdiri dari :
 - Kas Bank Rp 275.048.000

3. Rencana pengajuan GU NIHIL tgl 29 Desember 2022

4. Progres pelaporan s/d Bulan Desember 2022

No	Jenis laporan	Keterangan
1	Rekonsiliasi bank	Sudah dilaporkan
2	Laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SPJ Fungsional	Sudah dilaporkan
3	Laporan DTU PED - DUK KES	Sudah dilaporkan
4	Laporan DTU 25%	Sudah dilaporkan
5	Laporan Hibah Bansos	Sudah dilaporkan
6	Laporan Pajak	s.d bulan November

SPP/SPM tgl 31 Desember dan SP2D pada bulan Desember

No	Belanja/SPJ	SPP/SPM	Jumlah	Keterangan
1	Bansos Inflansi BBM	LS	Rp 126.900.000,-	Menunggu SP2D
2	Penyediaan natura dan pakan natura	LS	Rp 22.494.655,-	Menunggu SP2D
3	Kekurangan tunjangan Fungsional	LS	Rp 2.699.375,-	Menunggu SP2D
4	Bansos untuk RTM dan individu	LS	Rp 170.472.000,-	Diajukan sebelum tgl 12 desember
5	Bansos Sandang	LS	Rp 1.210.600,-	Diajukan sebelum tgl 12 Desember
6	TPP Bulan November	LS	Rp 117.000.000,-	Diajukan tgl 15 Desember
7	Bansos DBHCHT	LS	Rp 250.800.000,-	Diajukan sebelum tgl 12 Desember
8	GU Nihil	GU	Rp 116.676.491,-	Diajukan 29 Desember
	JUMLAH		Rp 808.253.121,-	

Capaian SPM TW 4

Indikator SPM	Target 2022	Realisasi 2022 (tw 4)
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	100%	99,59%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial	100%	100%
Rehabilitasi lanjut usia terlantar diluar panti sosial	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti sosial	100%	100%
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten /kota	100%	100%

PROYEKSI PENYERAPAN KEUANGAN s/d BULAN DESEMBER 2022

Pagu anggaran Rp 10.995.079.000

Uraian	Target		Realisasi		Deviasi
	Rp	%	Rp	%	%
KEU	10.995.079.000	100	10.061.591.268	91,51	8,49
FISIK	10.995.079.000	100	10.995.079.000	100	0

Deviasi sebesar 8,49% di sebabkan karena:

- 1. Bansos DBHCHT (adanya buruh pabrik rokok MPS yang resign dari pekerjaan);**
- 2. Penyediaan Gaji dan tunjangan lainnya (karena adanya beberapa PNS yang pensiun dan adanya 3 kekosongan pada Sub koordinator);**
- 3. Adanya selisih harga perolehan barang;**
- 4. Adanya PM yang meninggal dunia dan ketidak telitian dalam pembuatan SK Bupati;**
- 5. Adanya beberapa sub kegiatan yang bersifat penyediaan.**

PERMASALAHAN

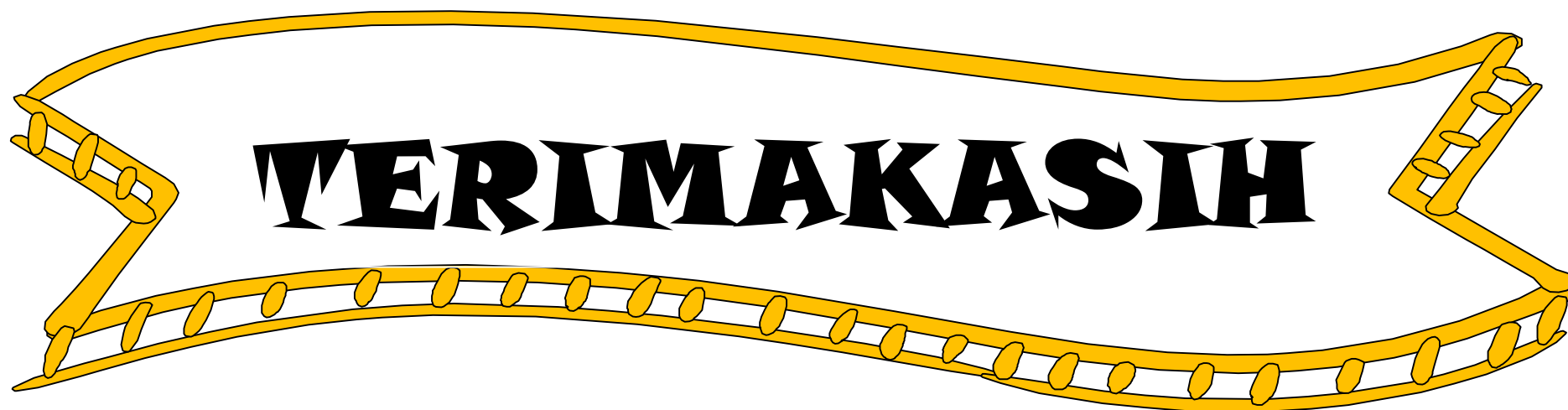
No	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN
1	Penanganan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bansos DBHCHT (adanya buruh pabrik rokok MPS yang resign dari pekerjaan);

PERMASALAHAN

No	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN
1	Rehabilitas Sosial Keg: Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan Penyediaan Alat Bantu	*) Adanya selisih harga perolehan barang *) Adanya PM yang meninggal dunia dan ketidak telitian dalam pembuatan SK Bupati

PERMASALAHAN

No	BIDANG	SUB KEGIATAN	PERMASALAHAN
1	P3A	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Adanya beberapa sub kegiatan yang bersifat penyediaan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	





NOTULEN

RAPAT RAKOR POP TW 4 DINAS SOSIAL P3A

1. Pelaksanaan

Hari/tanggal : Kamis, 08 Desember 2022

Waktu : Pukul 09.00 s/d selesai

Tempat : Aula Dinsos P3A (lantai 2)

2. Moderator : Kepala Dinas Sosial P3A Kab. Kebumen

3. Narasumber :

a) Dwi Asmoro, S.Sos (PPUPD Ahli Madya - Inspektur Daerah)

b) Nurul Azhar Shodiq, S.KM (Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
- Bag. Pengadaan Barang dan Jasa)

c) Agus Setyawan, S.E, M.E (Kepala Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia - BAPPEDA)

d) Arifiawan Maretyadi, S.E, MM (Fungsional Analisis kebijakan Ahli Muda
(Bagian Administrasi Pembangunan))

4. Paparan : Sekretaris Dinas Sosial P3A

Rakor POP TW IV adalah evaluasi terhadap anggaran yang di kelola, aspek keuangan (serapan anggaran) dan fisik, capaian SPM tw 4, permasalahan dan solusi, dan pekerjaan yang dipihak ketigakan. Total Anggaran belanja Rp 10.995.079.000,-

Capaian target dan realisasi keuangan dan fisik s/d tanggal
6 Desember 2022

Uraian	Target		Realisasi		Deviasi
	Rp	%	Rp	%	
Keu	10.995.079.000	100	9.253.344.147	84,16	15,84
Fisik	10.995.079.000	100	9.577.120.777	87,10	12,90

Proyeksi penyerapan keuangan s/d bulan desember 2022

Uraian	Target		Realisasi		Deviasi
	Rp	%	Rp	%	
Keu	10.995.079.000	100	10.061.591.268	91,51	8,49
Fisik	10.995.079.000	100	10.995.079.000	100	0

Deviasi sebesar 8,49% disebabkan karena:

- a. Bansos DBHCHT (adanya buruh pabrik rokok MPS yang resign dari pekerjaan)
- b. Penyerapan gaji dan tunjangan lainnya (karena adanya bebrpa PNS yang pensiun dan adanya 3 kekosongan pada sub coordinator)
- c. Adanya selisih harga perolehan barang
- d. Adanya PM yang meninggal dunia dan ketidak telitian dalam pembuatan SK Bupati
- e. Adanya beberapa sub kegiatan yang bersifat penyediaan.

5. Tanggapan dari narasumber

a. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

- Penyerapan ditahun 2022 ini diharapkan agar dioptimalkan, seperti contoh:
 - 1) Makan minum rapat jangan di kelompokkan di bidang, program, kegiatan dan sub kegiatan. Supaya anggaran bisa terserap dan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat
 - 2) BBM yang belum bisa terserap habis, silahkan bisa melaksanakan rapat koordinasi di luar kota kebumen, yang terpenting kegiatannya tidak fiktif
 - 3) Untuk Dinsos P3A yang terdapat dana yang bersifat fleksibel bisa di permakanan di Rumah Singgah Dosaraso, agar apabila terdapat Penerima Manfaat (PM) dan anak terlantar bisa tercukup dananya dan bisa di ambilkan dari dana Fleksibel tersebut.
 - 4) Kegiatan Hibah Bansos agar membuat BNBA cadangan calon penerima dengan nilai anggaran nol agar dapat mempermudah ketika ada PM yang meninggal dunia atau perubahan penerima.

b. INSPEKTORAT DAERAH

SPM hampir 100%, Inspektorat melakukan review program bansos dengan rekomendasi agar dipercepat prosesnya agar penyerapan anggarannya dan agar pekerjaannya tepat waktu sesuai momennya seperti bansos BBM.

c. PBJ

Mengingatkan terkait penggunaan ecatalog lokal untuk kegiatan seperti belanja makan minum dan ATK, apresiasi terkait dengan Rakor POP yang dilaksanakan oleh Dinsos P3A karena isi dan penyampaianya sudah sistematis. Ditahun 2023 implementasi e catalog lokal, sudah mengimplementasikan e purchasing e catalog lokal

d. BAPPEDA

Penyebab deviasi yang masih tinggi bisa dikendalikan untuk mitigasi seperti kasus bansis DBHCHT dimana banyak penerima bansos resign, untuk ditahun depan diharapkan agar bisa diverval ulang tidak seperti tahun ini dimana Dinsos P3A tidak mempunyai cukup waktu untuk melakukan verval karena program ini adalah program limpahan dari Bagian Perekononian.

Untuk deviasi gaji memang pilihan apakah akan digeser atau tetap karena apakah jabatan yang kosong akan diisi lagi atau tidak.

Untuk penyediaan agar dapat dipastikan apakah benar bahwa semua kasus yang ada tertangani

Notulen

Heru Suryo W